

**RENCANA KERJA
(RENJA) MURNI**

2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PONDOKSALAM**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penetapan Kinerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 selesai tepat waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja ini kami susun untuk dijadikan acuan kinerja operasional pelayanan tata pemerintahan di Kantor Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

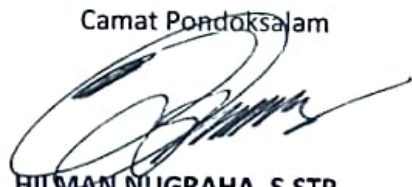
Penetapan kinerja Tahun 2023 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Pondoksalam pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui Instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, kami menyadari sepenuhnya bahwa Tak Ada Gading Yang Tak Retak. Oleh sebab itu sarana dan kritik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan penetapan kinerja ini.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pondoksalam, Juli 2022

Camat Pondoksalam



HILMAN NUGRAHA, S.STP

NIP.198108191999121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
2022.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RPKD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
.....	
BAB V PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, diamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kecamatan Pondoksalam tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Pondoksalam sebagai satuan kerja perangkat daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja kantor Camat Pondoksalam Tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoprasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kantor Camat Pondoksalam tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta yaitu **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"** Kecamatan Pondoksalam mempunyai Visi yang sama yaitu **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Penyusunan Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan Pondoksalam dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaimana wewenang Bupati atau walikota untuk pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk mengangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, masyarakat dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purwakarta maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Pondoksalam.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Pondoksalam disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-378 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 54 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam adalah tersedianya suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Pondoksalam, Dengan demikian Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pondoksalam ini dapat dijadikan acuan dan pegangan bagi Camat Pondoksalam selaku Pimpinan SKPD Kecamatan Pondoksalam dan seluruh perangkat Kantor Kecamatan Pondoksalam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Adapun Ruang Lingkup dari Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pondoksalam meliputi aspek pemerintahan umum dengan fungsi pelayanan umum sub fungsi lembaga eksekutif dan legislative, Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pondoksalam memuat penataan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ditingkat nagari dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Kecamatan PondokSalam tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan relisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang

dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium development Goals), tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap rancangan awal

2.5. penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan Sasaran SKPD, serta program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat Perhatian.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Kecamatan tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pondoksalam selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),kelauran (outputs), indikator-indikator tersebut berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan besaran Indikator Kinerja Untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program tahun 2021

Angaran Tahun 2021 Kecamatan Pondoksalam sebesar Rp. 3.231.101.071,- dengan 5 Program dan 30 kegiata. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.992.346.341 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,61%.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran Tahun 2022 dengan usulan sebesar Rp.3.426.386.559,-

Teruarai dalam 10 program dan kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal meningkat dari tahun 2021 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan

kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring evaluasi pembangunan
- c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pondoksalam dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pondoksalam 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pondoksalam pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

❖ STRATEGI

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparaturnya dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,
2. Meningkatkan pelayanan prima/pelayanan umum kepada masyarakat
3. Menciptakan Kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat

4. Menciptakan sumber-sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
 5. Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan
 6. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerjasama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dan aparatur desa
 7. Memperkuat komitmen seluruh komponen Kecamatan Pondoksalam untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis
 8. Memfasilitasi Kerjasama Lembaga/organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
 9. Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.
- ❖ KEBIJAKAN
1. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan desa
 2. Peningkatan pelayan prima kepada masyarakat
 3. Mengupayakan Kerjasama dengan instansi terkait dan Lembaga-lembaga Pendidikan, Kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi
 4. Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
 5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Pondoksalam

Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.	Peningkatan Kinerja aparatur kecamatan dan desa
Meningkatkan pelayanan prima/pelayanan umum kepada masyarakat	Peningkatan kinerja paratur kecamatan dan desa
Menciptakan Kerjasama dengan instansi vertical kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat	Peningkatan kinerja paratur kecamatan dan desa
Meningkatkan sumber-sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat	Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan
Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapat diklat teknis, fungsional dan structural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur kecamatan	Peningkatan kinerja paratur kecamatan dan desa
Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan pondoksalam untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil,dinamis	Mengupayan kerjasama dengan instansi terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, ama, tertib, stabil, dinamis, dan tertata rapi

Memfasilitasi Kerjasama Lembaga/organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, dan tertata rapi
Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Peningkatan kinerja paratur kecamatan dan desa

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondoksalam berdasarkan indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pondoksalam dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan Parasarana Aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Pondoksalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya : (trantib)
2. Peningkatan dan pewujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.

4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran muspika dan Dinas atau instansi terkait;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT kemerdekaan RI, karnaval umum, PAM lebaran.
7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se-kecamatan Pondoksalam.
8. Pembinaan aparat Kecamatan dan perangkat desa secara rutin.
9. Pelaksanaan apel pagi setiap senin dilanjutkan Brifing Staf.
10. Mengadakan rapat koordinasi Sekretaris Desa se-Kecamatan Pondoksalam setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi.
11. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
12. Mengadakan rapat Koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas instansi di tingkat kecamatan.
13. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Pondoksalam;
14. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat perdes tentang APBDes dan susunan Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa.
16. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa;
17. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

1. Pembinaan dengan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, Dana Desa, Dana bagi hasil Pajak dan Sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayah Kecamatan Pondoksalam.
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera
11. Pembinaan dalam rangka P2WKSS

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Kecamatan Pondoksalam terdapat dalam Tabel T.C.30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Pondoksalam sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain lingkup Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Pondoksalam masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

- (1.) Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2.) Sistem kerja yang belum optimal
- (3.) Keterbatasan keterampilan petugas;
- (4.) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Visi Kabupaten Purwakarta adalah "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Dalam Mendukung Visi Misi Kabupaten Purwakarta maka Kecamatan Pondoksalam memantapkan Visi yang sama yaitu **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pondoksalam, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada

- asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Purwakarta;
- 2) Optimalisasi patisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomis masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Pelayan Prima Kecamatan Pondoksalam sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
 - 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
 - 5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Asset pertanahan dan keamanan wilayah.

kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

- 5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Asset pertanahan dan keamanan wilayah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Pondoksalam dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Pondoksalam juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria : (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan OPD yang menangani.

Usulan Program dan kegiatan kecamatan Pondoksalam pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan Organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan sebagai prioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
 3. Program Pendidikan Non Formal
 4. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik serta program pembangunan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
5. Penerapan Jam Malam Bagi Remaja

Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan di desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Polindes, Posyandu maupun Poskesdes;

Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagai urusan pembangunan ketenagakerjaan serta pemberdayaan dan pembangunan Usaha mikro Kecil Menengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga perempuan yang mampu mengembangkan pemberdayaan UMKM dengan mengikutsertakan pada pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk :

- a. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi wanita ;
- b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komperatif usaha kecil menengah;

- c. Pembangunan system pendukung usaha bagi usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

Pada rapat Musrenbang tidak ada usulan program/kegiatan yang ditunjukan kepada Kecamatan Pondoksalam selaku organisasi Perangkat Daerah, usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atas harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan, seperti pada Tabel T- C.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pondoksalam dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;

Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Purwakarta, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Purwakarta telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten PondokSalam yaitu Misi : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik bersih dan profesional. Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang bersih profesional dan berintegritas. Visi dan Misi Kecamatan PondokSalam yang sudah ditetapkan harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah dan operasional berupa pernyataan tujuan organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini. Maka Kecamatan PondokSalam dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi Kecamatan PondokSalam dalam rangka mewujudkan visinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan PondokSalam tahun 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan PondokSalam tahun 2018-2023 adalah;

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih profesional dan berintegritas.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan PondokSalam seperti yang tertuang dalam Renstra Kecamatan PondokSalam 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. - Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang baik dan efektif
 - Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern
- b. - Meningkatnya pengawasan dan integritas penyelenggaraan urusan Pemerintahan
 - Meningkatnya kualitas profesional Aparatur Sipil Negara

3.3 Program dan kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran tertentu keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2023 yang akan dilaksanakan seperti tabel berikut (tabel T.C 33)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Sebagai Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mengikuti peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pondoksalam.

Untuk Mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 menetapkan 5 (lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan.

Program yang dilaksanakan ada 5 (lima) yaitu :

1. Program Penganggaran Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dan terdapat 14 (empat belas) kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 meliputi

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penataan Organisasi
8. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat yang ada di Kecamatan
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Desa
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.2 Pendanaan

Adapun Rumusan pendanaan pada rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 ada sebesar Rp. 3.560.986.559,-Rincian rencana kerja dan pendaan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Visi, misi dan Program kegiatan Kantor Kecamatan Pondoksalam dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang yang dalam penyusunannya mengacu pada rencana strategis Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Kecamatan Tahun 2022 untuk itu perlu ditetapkan pedoman dan kaidah pelaksanaannya.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara *jujur, konsisten, transparan*.

Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Kecamatan Pondoksalam dan dapat sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2022

Pondoksalam, Juli 2022

Camat Pondoksalam



HILMAN NUGRAHA, S.STP
NIP.198108191999121002

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PONDOKSALAM

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Pondoksalam	Persentase pemenuhan penunjang urusan		3,348,115,259					3,348,115,259
	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				15,575,000	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				15,575,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2,910,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2,910,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	1,680,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	1,680,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2,795,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2,795,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	3	3,590,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	3	3,590,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pondoksalam	Meningkatnya pengawasan Perangkat Daerah	1	4,600,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pondoksalam	Meningkatnya pengawasan Perangkat Daerah	1	4,600,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,782,047,103	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,782,047,103
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pondoksalam	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	2,779,667,103	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pondoksalam	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	2,779,667,103

Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1	2,380,000	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1	2,380,000
Koordinasi dan penyusunan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	-	Koordinasi dan penyusunan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	-
Administrasi Brang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				2,285,000	Administrasi Brang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				2,285,000
Rekonsiliaso dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen penyusunan barang milik daerah	1	2,285,000	Rekonsiliaso dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Dokumen penyusunan barang milik daerah	1	2,285,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				130,279,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah				130,279,400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah pemenuhan komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 jenis	10,510,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah pemenuhan komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 jenis	10,510,500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	28 jenis	11,217,950	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	28 jenis	11,217,950
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	25 item	73,113,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	25 item	73,113,100
Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah pemenuhan barang cetak dan pengadaan	5 blok	20,101,850	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah pemenuhan barang cetak dan pengadaan	5 blok	20,101,850
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	73 OH	15,336,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	73 OH	15,336,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108,624,250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108,624,250
Pengadaan Mebe	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Mebel yang disediakan	4 jenis	-	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Mebel yang disediakan	4 jenis	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah item pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	108,624,250	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah item pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	108,624,250
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188,672,506	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188,672,506
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah penyediaan listrik	12 bulan	17,998,920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah penyediaan listrik	12 bulan	17,998,920
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah penyediaan pegawai Non ASN	7 orang	170,673,586	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah penyediaan pegawai Non ASN	7 orang	170,673,586
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120,632,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120,632,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Pembayaran Pahak Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 unit	41,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Pembayaran Pahak Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 unit	41,200,000
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit	-	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pondoksalam	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	7,420,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pondoksalam	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	7,420,000


Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	2 gedung kantor	72,012,000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan Pondoksalam	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	2 gedung kantor	72,012,000
Penataan Organisasi				-	Penataan Organisasi				-
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kecamatan Pondoksalam	Persentase Pelayanan Publik kepada Masyarakat	100%	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kecamatan Pondoksalam	Persentase Pelayanan Publik kepada Masyarakat	100%	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				-
Peningkatan Efektifitas Pelayanan Pelayan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Pondoksalam	Persentase pembinaan dan pengawasan ekonomi kreatif dan bumdes	100%	-	Peningkatan Efektifitas Pelayanan Pelayan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Pondoksalam	Persentase pembinaan dan pengawasan ekonomi kreatif dan bumdes	100%	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3,780,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3,780,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				3,780,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				3,780,000
Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kecamatan Pondoksalam	Persentase kegiatan Koordinisasi	100%	3,780,000	Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kecamatan Pondoksalam	Persentase kegiatan Koordinisasi	100%	3,780,000

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pondoksalam	Persentase kegiatan tokoh agama dan tokoh masyarakat	100%		-	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pondoksalam	Persentase kegiatan tokoh agama dan tokoh masyarakat	100%			
PROGRAM PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				44,350,600		PROGRAM PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						44,350,600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala				44,350,600		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala						44,350,600
Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam Rangka memanfaatkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kecamatan Pondoksalam	persentase penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	100%	44,350,600	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam Rangka memanfaatkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kecamatan Pondoksalam	persentase penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	100%				44,350,600
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				53,802,325		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						53,802,325
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				53,802,325		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						53,802,325
Fasilitasi Asdministrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pondoksalam	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100%	12,360,000	Fasilitasi Asdministrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pondoksalam	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100%				12.360.000

Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pondoksalam	Persentase pengawasan kegiatan Musrenbang Kecamatan	100%	17,780,700	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pondoksalam	Persentase pengawasan kegiatan Musrenbang Kecamatan	100%	17,780,700
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pondoksalam	Sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sosialisasi hasil pembangunan	100%	23,661,625	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pondoksalam	Sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sosialisasi hasil pembangunan	100%	23,661,625

Pondoksalam, 15 Juli 2021

Camat Pondoksalam



HILMAN NUGRAHA, S.STP

NIP. 19810191999121002

8	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran				100	100	100	0%	54%	100	100	
9	Capaian Hasil Survey Keputusan Masyarakat				Baik	Baik	Baik	0%		Baik	Baik	
10	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan				100	100	100	0%		100	100	
11	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100	100	100	0%		100	100	
12	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan				100	100	100	0%	23,94%	100	100	
13	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan				100	100	100	0%	39,63%	100	100	

Pondoksalam, 15 Juli 2022

Camat Pondoksalam



HILMAN NUGRAHA, S.STP

NIP. 19810191999121002

TABEL 1.C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH

: KECAMATAN PONDOKSALAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01	KECAMATAN PONDOKSALAM				3,426,386,559				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Pondoksalam		3,348,115,259				3,560,986,559
7 01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,575,000				15,379,600
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pondoksalam	2	2,910,000	APBD		2	2.809.800
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kecamatan Pondoksalam	1	1,680,000	APBD		1	1.584.900
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pondoksalam	1	2,795,000	APBD		1	2.795.000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kecamatan Pondoksalam	3	3,590,000	APBD		3	3.589.900
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan Perangkat Daerah	Kecamatan Pondoksalam	1	4,600,000	APBD		1	4,600,000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,782,047,103				2,792,045,003
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pondoksalam	100%	2,779,667,103	APBD		100%	2.779.667.103

7	01	01	2.02	05	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahu SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kecamatan Pondoksalam	1	2,380,000	APBD	1	12,377,900
07	01	01	2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2,285,000			2,285,000
7	01	01	2.03		Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan barang milik daerah	Kecamatan Pondoksalam	1	2,285,000	APBD	1	2,285,000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					130,279,400			197,774,131
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Pondoksalam	13 jenis	10,510,500	APBD	13 jenis	11,847,600
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Pondoksalam	28 jenis	11,217,950	APBD	28 jenis	24,239,400
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Pondoksalam	25 item	73,113,100	APBD	25 item	126,177,531
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan pengadaan	Kecamatan Pondoksalam	5 blok	20,101,850	APBD	5 blok	20,101,600
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Kecamatan Pondoksalam	73 OH	15,336,000	APBD	73 OH	15,408,000
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108,624,250			75,810,550
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah item pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pondoksalam	6 jenis	108,624,250	APBD	6 jenis	75,810,550
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188,672,506			189,168,375
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik	Kecamatan Pondoksalam	12 bulan	17,998,920	APBD	12 bulan	17,995,183
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan pegawai Non ASN	Kecamatan Pondoksalam	7 orang	170,673,586	APBD	7 orang	171,173,192
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120,632,000			78,820,000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pakah Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kecamatan Pondoksalam	9 unit	41,200,000	APBD	9 unit	37,200,000

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pondoksalam	3 jenis	7,420,000	APBD	3 jenis	5,920,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Kecamatan Pondoksalam	2 gedung kantor	72,012,000	APBD	2 gedung kantor	35,700,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3,780,000			3,780,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				3,780,000			3,780,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi	Kecamatan Pondoksalam	100%	3,780,000	APBD	100%	3,780,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				44,350,600			148,985,600
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah				44,350,600			148,985,600
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam Rangka memanfaatkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	persentase penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pondoksalam	100%	44,350,600	APBD	100%	148,985,600
01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				30,140,700			46,938,300
7	01	05	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				30,140,700			46,938,300
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	Kecamatan Pondoksalam	100%	12,360,000	APBD	100%	14,580,000
7	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pengawasan kegiatan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pondoksalam	100%	17,780,700	APBD	100%	20,297,100
7	01	06.2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	Kecamatan Pondoksalam	100%		APBD	100%	12,061,200

